

PERAYAAN MILANGKALA DI TATAR SUNDA: KONSTRUKSI HISTORIS, SIMBOL KEKUASAAN, DAN EDUKASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HISTORIOGRAFI KULTURAL

Mumuh Muhsin Zakaria

Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Sumedang

E-mail: mumuh.muhsin@unpad.ac.id

ABSTRAK. Perayaan *milangkala* (hari jadi) kabupaten/kota di Tatar Sunda sering kali dipandang sebatas festival budaya tahunan yang bersifat seremonial. Padahal, di balik kemegahan ritus tersebut, terdapat kontestasi memori, penegasan legitimasi politik, dan transmisi nilai-nilai pedagogis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perayaan Milangkala Tatar Sunda melalui tiga pisau analisis: konstruksi historis penentuan hari jadi, artikulasi simbol kekuasaan elit, dan fungsinya sebagai media edukasi publik. Menggunakan metode sejarah kritis yang dikombinasikan dengan pendekatan historiografi kultural dan semiotika, penelitian ini melacak bagaimana narasi sejarah lokal diproduksi, direproduksi, dan dikonsumsi oleh masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konstruksi historis hari jadi di Tatar Sunda mayoritas bersandar pada mitopoetik babad atau legitimasi piagam kolonial yang mengalami proses "penyucian" sejarah; (2) Simbol kekuasaan bermanifestasi dalam tata rupa prosesi adat (seperti kirab pataka dan *helaran*) yang berfungsi memperkuat hegemoni politik elit lokal; dan (3) Rangkaian *milangkala* belum sepenuhnya optimal menjadi ruang edukasi publik yang kritis, melainkan lebih dominan sebagai komodifikasi budaya berbasis pariwisata. Kebaruan penelitian ini terletak pada dekonstruksi terhadap perayaan *milangkala* yang selama ini dianggap *taken for granted*, dengan menyingkap bagaimana memori kolektif dikelola oleh kekuasaan sebagai instrumen integrasi sosial sekaligus pelanggaran *status quo*.

Kata Kunci: *Milangkala*; Tatar Sunda; Historiografi Kultural; Simbol Kekuasaan; Edukasi Publik.

THE MILANGKALA CELEBRATIONS IN TATAR SUNDA: HISTORICAL CONSTRUCTION, SYMBOLS OF POWER, AND PUBLIC EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF CULTURAL HISTORIOGRAPHY

ABSTRACT. The anniversary celebrations of regencies/cities in Tatar Sunda (the Sundanese region) are often perceived merely as annual ceremonial cultural festivals. Yet, behind the grandeur of these rites, there lie contests of memory, assertions of political legitimacy, and transmissions of pedagogical values. This research aims to analyze the Tatar Sunda anniversary celebrations through three analytical lenses: the historical construction of the determination of the anniversary date, the articulation of symbols of elite power, and their function as a medium for public education. Employing a critical historical method combined with a cultural historiography approach and semiotics, this study traces how local historical narratives are produced, reproduced, and consumed by modern society. The findings reveal that: (1) The historical construction of anniversary dates in Tatar Sunda largely relies on the mythopoeitics of babad (chronicles) or the legitimation of colonial charters that have undergone a process of historical "sanctification"; (2) Symbols of power manifest in the visual arrangements of customary processions (such as kirab pataka [flags/standards procession] and *helaran* [parades]) that function to reinforce the political hegemony of local elites; and (3) The series of anniversary events have not yet been fully optimized as a space for critical public education, but rather dominate as a tourism-based commodification of culture. The novelty of this research lies in its deconstruction of anniversary celebrations that have long been taken for granted, by revealing how collective memory is managed by power as an instrument of social integration while simultaneously perpetuating the *status quo*.

Keywords: Anniversary (*Milangkala*); Tatar Sunda; Cultural Historiography; Symbols of Power; Public Education.

PENDAHULUAN

Perayaan hari jadi atau dalam kosmologi masyarakat Sunda dikenal dengan istilah *milangkala*, telah menjelma menjadi sebuah ritus tahunan yang masif dan sakral di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat (Tatar Sunda). Mulai dari tingkat desa hingga provinsi, *milangkala* dirayakan dengan pengerahan massa,

parade kebudayaan (*helaran*), sidang paripurna istimewa DPRD, hingga ziarah ke makam para leluhur (*kuramasan* atau *nyekar*). Secara kasatmata, perayaan ini tampak sebagai representasi murni dari pelestarian kearifan lokal (*local wisdom*) dan perayaan kegembiraan rakyat. Namun, jika dibedah melalui kacamata historiografi kritis, perayaan hari jadi bukanlah sebuah peristiwa kebudayaan yang tumbuh di

ruang hampa. Ia adalah sebuah arena kontestasi memori yang sarat dengan kepentingan politik, negosiasi identitas, dan upaya legitimasi kekuasaan (Burke, 2005).

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pencarian dan penetapan hari jadi daerah di Indonesia, khususnya pasca-otonomi daerah tahun 1999, mengalami eskalasi yang signifikan. Setiap daerah berlomba-lomba melacak asal-usulnya, sering kali menarik garis waktu sejauh mungkin ke masa lampau demi meraih predikat sebagai daerah yang "tua", "luhung", dan "bersejarah". Di Tatar Sunda, fenomena ini terlihat jelas dalam penetapan hari jadi kota-kota seperti Bandung, Bogor, Cirebon, Sumedang, hingga Garut. Penetapan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi tersebut sering kali memicu perdebatan akademik yang sengit di kalangan sejarawan, budayawan, dan birokrat (Suryanegara, 1995). Ada daerah yang memilih momentum penyerahan piagam oleh VOC, ada yang memilih tanggal pendirian benteng pertahanan masa kerajaan, dan ada pula yang memilih mitos runtuhnya sebuah kerajaan besar sebagai titik mula eksistensi mereka.

Persoalan mendasar muncul ketika proses konstruksi historis ini terjebak dalam romantisasi masa lalu (*anachronism*) dan politisasi sejarah. Sejarah lokal tidak lagi ditulis berdasarkan kaidah heuristik yang ketat, melainkan dipesan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan politis elit penguasa saat ini (Nordholt et al., 2008). Ketika sebuah tanggal telah diketok palu melalui Peraturan Daerah (Perda), tanggal tersebut seketika berubah menjadi "kebenaran absolut" yang dirayakan setiap tahun. Rakyat diwajibkan untuk mengingatkannya, menghormatinya, dan menginternalisasikannya sebagai bagian dari identitas diri mereka. Di sinilah fungsi *milangkala* bergeser dari sekadar pengingat waktu kronologis menjadi sebuah instrumen budaya yang hegemonik.

Secara teoretis, perayaan *milangkala* dapat dibaca sebagai bentuk penemuan tradisi (*invention of tradition*) sebagaimana yang digagas oleh Hobsbawm & Ranger (1992). Tradisi-tradisi yang tampak tua dan kuno sering kali sebenarnya merupakan ciptaan baru yang sengaja dikonstruksi untuk menanamkan nilai-nilai atau norma perilaku tertentu melalui repetisi. Dalam konteks Tatar Sunda, penggunaan pakaian adat *baju pangsi* dan *kebaya Sunda*, pembacaan manuskrip kuno dengan teknik *beluk*, hingga prosesi penyerahan air suci dari berbagai mata air keramat (*siraman*) dalam rangkaian *milangkala*, sering kali merupakan modifikasi estetis modern

yang dibungkus dengan narasi "keberlanjutan tradisi leluhur".

Di sisi lain, terdapat ketimpangan yang lebar antara pemanfaatan *milangkala* sebagai panggung politik elit dengan fungsinya sebagai ruang edukasi publik. Masyarakat umum sering kali ditempatkan hanya sebagai penonton pasif dalam karnaval, atau konsumen dalam pasar malam yang menyertai perayaan tersebut. Edukasi publik mengenai *mengapa* tanggal tersebut dipilih, *bagaimana* dinamika sosial politik masyarakat pada masa tersebut, dan *apa* relevansi kritisnya bagi masa depan daerah, kerap kali tenggelam oleh hiruk-pikuk seremonial dan politisasi jargon-jargon pembangunan oleh kepala daerah yang sedang menjabat.

Meskipun kajian mengenai budaya Sunda telah banyak dilakukan, penelitian yang secara spesifik membedah perayaan *milangkala* sebagai sebuah produk kebudayaan yang mempertemukan antara konstruksi sejarah, simbol kekuasaan, dan pedagogi sosial masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian terdahulu terjebak pada pendekatan deskriptif-folkloris yang menarasikan jalannya upacara adat tanpa melakukan dekonstruksi kritis terhadap struktur kekuasaan yang bermain di baliknya. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan menyajikan analisis historiografi kultural yang kritis dan multidimensional terhadap perayaan *Milangkala* Tatar Sunda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis (*critical historical method*) yang diintegrasikan dengan pendekatan historiografi kultural (*cultural historiography*) dan analisis semiotika. Metode sejarah kritis digunakan untuk menguji validitas sumber-sumber tertulis yang dijadikan dasar penetapan hari jadi daerah di Tatar Sunda. Proses penelitian mengikuti empat tahapan standar metodologi sejarah, yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber): Mengumpulkan dokumen-dokumen resmi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Hari Jadi, naskah akademik penetapan hari jadi, laporan panitia riset sejarah, manuskrip lokal (*babad/carita*), dokumen kolonial (seperti *Resolutie* VOC atau *Staatsblad*), serta rekaman audio-visual dan dokumentasi pelaksanaan *milangkala* di beberapa kabupaten/kota sampel di Jawa Barat (di antaranya Bandung, Cirebon, Sumedang, dan Bogor) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026).

2. Kritik Sumber (Verifikasi): Melakukan kritik eksternal untuk menguji otentisitas fisik dokumen dan kritik internal untuk menguji kredibilitas isi narasi sejarah yang terkandung dalam naskah akademik hari jadi tersebut.
3. Interpretasi (Analisis): Melakukan sintesis dan analisis mendalam terhadap data yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, pendekatan semiotika Roland Barthes digunakan untuk membedah makna denotatif, konotatif, dan mitos dari simbol-simbol, pakaian, rupa prosesi, dan tata spasial yang digunakan selama perayaan *milangkala*. Pendekatan historiografi kultural digunakan untuk melihat bagaimana teks sejarah diproduksi di bawah pengaruh formasi sosial-politik tertentu.
4. Historiografi (Penulisan): Menyusun hasil analisis secara naratif-analitis, dengan menekankan pada pemaparan yang eksplanatif mengenai hubungan kausalitas antara teks sejarah, kekuasaan, dan masyarakat.

Historiografi kultural tidak lagi melihat sejarah sebagai rekaman peristiwa masa lalu yang objektif dan linier, melainkan sebagai sebuah medan konstruksi sosial di mana makna diproduksi dan diperebutkan (Ankersmit, 2002). Dalam perspektif ini, penulisan sejarah—termasuk penulisan sejarah lokal untuk hari jadi—selalu terikat oleh posisi ideologis penulisnya dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Menurut (Foucault, 1972), pengetahuan (termasuk pengetahuan sejarah) tidak pernah netral; ia selalu berkelindan dengan kekuasaan (*power/knowledge*). Siapa yang menguasai masa lalu melalui penulisan sejarah resmi, dialah yang menguasai masa kini.

Dalam konteks perayaan *milangkala*, konsep memori kolektif (*collective memory*) dari Halbwachs (1992) menjadi relevan. Halbwachs berpendapat bahwa memori bukanlah fungsi biologis individu, melainkan konstruksi sosial yang dirawat oleh kelompok. Memori kolektif membutuhkan "tempat" (*loci*) dan "ritme" (*rituals*) agar dapat bertahan. Perayaan *milangkala* bertindak sebagai ritme tahunan yang melembagakan memori kolektif pilihan tersebut ke dalam kognisi masyarakat, sementara monumen atau alun-alun kota bertindak sebagai tempatnya. Dalam proses melembagakan memori ini, terjadi apa yang disebut "amnesia selektif" (*selective amnesia*), di mana peristiwa-peristiwa sejarah yang dianggap kelam, memalukan, atau tidak sejalan dengan narasi harmoni penguasa sengaja dihapus dan digantikan oleh narasi

kegemilangan masa lalu (*golden age romanticism*).

Teori *Invention of Tradition* yang dirumuskan oleh Hobsbawm & Ranger (1992) menyediakan alat analisis yang tajam untuk membedah aspek artifisial dari perayaan *milangkala*. Hobsbawm membedakan antara "tradisi kuno" yang tumbuh organik dengan "tradisi yang ditemukan" (*invented tradition*). Tradisi yang ditemukan adalah sekumpulan praktik yang diatur oleh aturan yang diterima secara terbuka atau tersirat, serta bersifat ritual atau simbolis, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan, yang secara otomatis mengimplikasikan kontinuitas dengan masa lalu.

Di Tatar Sunda, fenomena ini terlihat ketika ritual-ritual kraton atau bangsawan masa lalu (*menak*) dihidupkan kembali, dimodifikasi, dan ditampilkan dalam ruang publik modern yang demokratis. Upacara penyerahan *pataka* (bendera lambang daerah) dari *sesepeuh* adat kepada bupati/wali kota, penggunaan bahasa Sunda halus (*lemes*) yang artifisial dalam pidato resmi, serta penciptaan tarian-tarian penyambutan baru yang diklaim sebagai "tarian sakral warisan leluhur" adalah bukti nyata bagaimana masa lalu direkayasa demi kepentingan integrasi sosial dan identitas lokal di masa kini.

Untuk membedah rupa perayaan *milangkala*, teori semiotika Roland Barthes mengenai mitos (*mythologies*) digunakan. Barthes (1972) menyatakan bahwa tanda bekerja melalui dua sistem signifikasi: denotasi (makna harfiah) dan konotasi (makna kultural/ideologis). Ketika konotasi menjadi natural dan diterima begitu saja sebagai sebuah kebenaran yang wajar, ia berubah menjadi *mitos*.

TAKSONOMI MAKNA PERAYAAN MILANGKALA

OBJEK/ RITUS	MAKNA DENOTATIF (SISTEM PERTAMA)	MAKNA KONOTATIF (SISTEM KEDUA)	MITOS KEBUDAYAAN (SISTEM KETIGA)
Kirab Pataka	Parade membawa bendera lambang daerah mengelilingi kota.	Pemimpin daerah adalah pewaris sah takhta para leluhur pendiri kota.	Legitimasi kekuasaan politik birokrasi bersifat sakral dan tak tergoyahkan. Harmoni sosial dan kepatuhan kultural rakyat terhadap tatanan nilai Sunda.
Baju Pangsi/ Kebaya	Pakaian kain berwarna hitam atau kain kebaya tradisional.	Identitas kesundaan yang bersahaja namun agung.	Keberlanjutan dinasti politis-kultural yang melintasi batas zaman.
Ziarah Makam Bupati	Mengunjungi dan mendoakan kuburan para mantan penguasa.	Penghormatan terhadap jasa para perintis daerah.	

Melalui tabel semiotika di atas, kita dapat melihat bahwa setiap ornamen dalam *milangkala* dirancang untuk memproduksi mitos-mitos politik yang menaturalisasi kekuasaan elit lokal di mata rakyat.

Penelitian terdahulu mengenai hari jadi daerah di Indonesia umumnya terbagi ke dalam dua arus besar. Arus pertama adalah penelitian sejarah konvensional yang berfokus pada perdebatan kronologis dan filologis mengenai ketepatan tanggal penetapan hari jadi (misalnya, Lubis, 2003; Ekadjati, 2005). Arus kedua adalah penelitian antropologi-pariwisata yang melihat *milangkala* sebagai festival budaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata (misalnya, Picard, 2006).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan dekonstruktif multi-dimensional yang menempatkan perayaan *milangkala* Tatar Sunda sebagai sebuah teks politik-kultural. Penelitian ini tidak lagi memperdebatkan apakah sebuah tanggal hari jadi itu "benar" atau "salah" secara positivistik, melainkan membongkar *mengapa* narasi sejarah tertentu dipilih oleh penguasa, *bagaimana* simbol-simbol feodal disublimasikan ke dalam sistem birokrasi modern, dan *mengapa* perayaan yang menghabiskan anggaran publik yang besar ini gagal bertransformasi menjadi ruang edukasi publik yang emansipatif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan cara pandang baru dalam melihat hubungan antara historiografi, ritualitas publik, dan pelanggaran kekuasaan di tingkat lokal pada era pasca-kebenaran (*post-truth*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Historis Hari Jadi: Antara Fakta, Mitos, dan Piagam Kolonial

Proses penentuan hari jadi kabupaten dan kota di Tatar Sunda merupakan sebuah studi kasus yang menarik mengenai bagaimana sejarah dinegosiasikan. Secara umum, terdapat tiga kecenderungan utama dalam konstruksi historis hari jadi di wilayah ini: bersandar pada mitopoetik naskah tradisional (*babad*), merujuk pada dokumen birokrasi kolonial, atau memilih momentum peristiwa politik pra-kolonial.

Sebagai contoh, Hari Jadi Kota Bandung yang ditetapkan jatuh pada tanggal 25 September 1810. Penetapan ini didasarkan pada riset sejarah yang merujuk pada tanggal dikeluarkannya surat keputusan (*beshuit*) oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels kepada Bupati

Bandung Raden Adipati Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibu kota kabupaten dari Krapyak (Dayeuhkolot) ke situs Bandung yang sekarang (Lubis, 2003). Secara historis, momentum ini adalah produk dari ambisi kolonial liberal Daendels untuk membangun *De Groote Postweg* (Jalan Raya Pos). Namun, dalam narasi perayaan *milangkala* kontemporer, peran Daendels yang kolonial dan represif sering kali direduksi atau diselimuti oleh narasi kepahlawanan dan kearifan lokal Wiranatakusumah II (*The Founder*). Di sini terjadi proses "penyucian" sejarah (*sanitization of history*), di mana unsur-unsur kolonialisme yang traumatis dieliminasi demi menghasilkan narasi pendirian kota yang heroik dan mandiri.

Kasus yang berbeda terjadi di Kabupaten Sumedang, yang menetapkan hari jadinya pada tanggal 22 April 1578. Tanggal ini merujuk pada peristiwa penyerahan mahkota emas *Binokasih Sanghyang Pake* dari Kerajaan Pajajaran yang runtuh kepada Prabu Geusan Ulun dari Sumedang Larang. Peristiwa ini menandai klaim Sumedang Larang sebagai penerus sah (*legitimate successor*) dari imperium Sunda (Suryanegara, 1995). Konstruksi sejarah ini sangat kental dengan nuansa legitimasi mitopoetik. Meskipun validitas kronologis tanggal tersebut masih diperdebatkan oleh para sejarawan karena bersandar pada teks *Babad Sumedang* yang ditulis berabad-abad kemudian, pemerintah daerah tetap mengesahkannya. Mengapa? Karena narasi "pewaris Pajajaran" memberikan modal simbolik yang luar biasa besar bagi identitas kolektif dan kebanggaan kultural masyarakat Sumedang.

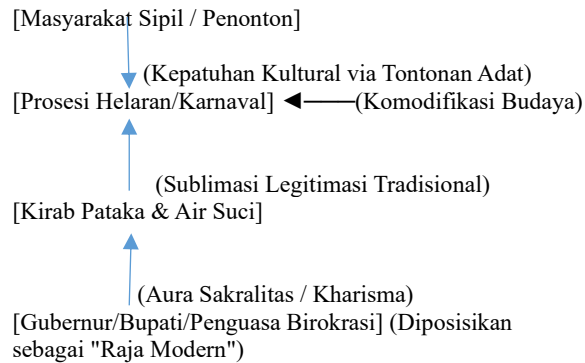
Proses konstruksi ini menunjukkan bahwa dalam historiografi hari jadi, kegunaan praktis masa lalu (*the usability of the past*) jauh lebih diutamakan daripada kebenaran faktual objektif. Teks sejarah diolah sedemikian rupa melalui naskah akademik yang disusun oleh tim yang dibentuk pemerintah, disidangkan di DPRD, dan disahkan menjadi undang-undang lokal (Perda). Begitu Perda disahkan, diskursus sejarah tersebut ditutup. Kritik-kritik dari sejarawan independen dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas identitas daerah. Sejarah telah berhasil dibakukan menjadi dogma politik tahunan.

Simbol Kekuasaan dalam Ritus *Milangkala*: Sublimasi Feodalisme Kultural

Perayaan *milangkala* adalah sebuah pertunjukan teater politik yang megah. Di dalam teater ini, struktur kekuasaan modern mengenakan topeng tradisional untuk memancarkan aura otoritas yang sakral. Konsep *menak* (bangsawan Sunda) yang secara formal-politik telah runtuh

seiring tumbuhnya sistem republik, dihidupkan kembali dalam bentuk estetika birokrasi selama perayaan berlangsung.

Manifestasi paling kentara dari simbol kekuasaan ini dapat dianalisis melalui struktur prosesi adat berikut:



Pada upacara resmi hari jadi, gubernur, bupati, atau wali kota beserta para pejabat dinas tidak mengenakan seragam dinas harian (PDH) atau jas modern, melainkan pakaian adat *beskap Sunda* lengkap dengan *bendo* (penutup kepala) dan *keris* yang terselip di pinggang. Istri bupati mengenakan *kebaya merak* yang anggun. Secara semiotis, pakaian ini bukan sekadar pakaian adat biasa; ia adalah pakaian *menak* abad ke-19 yang mengindikasikan status sosial yang tinggi, jarak sosial, dan otoritas. Ketika bupati mengenakan pakaian tersebut dan duduk di kursi pelaminan di Alun-Alun atau ruang sidang DPRD yang didekorasi menyerupai pendopo kraton, struktur kekuasaan birokratis modern (yang rasional-legal menurut Max Weber) seketika bertransformasi menjadi struktur kekuasaan tradisional yang kharismatik dan patrimonial (Weber, 1968).

Ritus *Kirab Pataka* (parade bendera lambang daerah) mempertegas hal ini. Bendera daerah diperlakukan layaknya *pusaka* kerajaan. Ia disimpan di ruang khusus di rumah dinas bupati, dikeluarkan hanya setahun sekali dengan upacara pembakaran kemenyan atau pembacaan doa, lalu dikirab mengelilingi kota dengan pengawalan ketat pasukan tradisional yang membawa tombak. Masyarakat berdiri di pinggir jalan, mendongak melihat lambang kekuasaan tersebut lewat di depan mereka. Melalui ritus ini, penguasa daerah sedang mengirimkan pesan subliminal kepada publik: bahwa mereka adalah pemegang sah mandat dari para leluhur untuk memimpin wilayah tersebut. Kekuasaan mereka tidak hanya absah secara hukum pemilu, tetapi juga diberkati secara spiritual (*structural-cosmological legitimacy*).

Hal ini sejalan dengan pandangan Anderson (2006) mengenai konsep kekuasaan

Jawa, yang dalam banyak hal memiliki kemiripan dengan kosmovisi elit Sunda pasca-Mataram. Kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang konkret, homogen, dan bersumber dari kekuatan supranatural. Ritual-ritual dalam *milangkala* seperti ziarah ke makam para bupati terdahulu (*nyekar*) merupakan upaya dari penguasa masa kini untuk "menyerap" sebagian dari sisa-sisa kharisma dan legitimasi yang dimiliki oleh para leluhur tersebut. Dengan demikian, *milangkala* berfungsi sebagai instrumen reproduksi kelas penguasa untuk melanggengkan *status quo* kultural mereka di hadapan masyarakat sipil.

Edukasi Publik dalam Kosongnya Narasi

Kritis: Antara Pariwisata dan Hegemoni

Di tengah dominasi simbol kekuasaan dan kemegahan ritus seremonial, bagaimanakah posisi edukasi publik dalam perayaan *milangkala*? Idealnya, hari jadi daerah menjadi momentum refleksi historis yang mencerdaskan warga. Ia harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial warga kota: *Siapa kami? Dari mana kami berasal? Dan ke mana kota ini akan kami bawa bersama?* Namun, realitas empiris menunjukkan terjadinya reduksi pedagogis yang akut.

Edukasi publik dalam perayaan *milangkala* umumnya terjebak dalam dua kanal: komodifikasi pariwisata dan propaganda keberhasilan pembangunan. Melalui kanal pariwisata, perayaan hari jadi dikemas sebagai produk industri kreatif untuk menarik wisatawan. Festival kuliner tradisional, pameran kerajinan, dan panggung hiburan rakyat yang menampilkan artis-artis ibu kota menjadi menu utama. Rakyat diberikan hiburan (*panem et circenses*—roti dan sirkus) agar mereka melupakan sejenak persoalan-persoalan riil kota seperti kemacetan, kemiskinan, banjir, atau korupsi birokrasi. Sejarah dalam konteks ini telah mengalami komodifikasi; ia dieksploitasi aspek eksotis dan estetikanya saja, sementara nilai esensial dan kritisnya dibuang.

Melalui kanal propaganda, sidang paripurna DPRD dan pidato bupati dalam perayaan *milangkala* selalu dipenuhi oleh deretan angka-angka klaim keberhasilan pembangunan: pertumbuhan ekonomi yang meningkat, raihan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, hingga deretan piala penghargaan yang diterima pemerintah daerah selama setahun terakhir. Narasi *milangkala* diubah menjadi laporan pertanggungjawaban politik sepihak yang glorifikatif. Ruang publik dipenuhi oleh baliho-baliho raksasa bergambar wajah bupati dan wakil bupati yang tersenyum ramah dengan

latar belakang teks ucapan selamat hari jadi daerah. Di sini, *milangkala* telah sepenuhnya dibajak oleh kepentingan politik elektoral, terutama jika perayaan tersebut jatuh pada tahun-tahun politik menjelang Pilkada.

Akibatnya, terjadi kepatuhan budaya yang buta (*blind cultural compliance*) di kalangan generasi muda. Anak-anak sekolah diwajibkan memakai baju adat pada hari tersebut tanpa pernah diberikan pemahaman kritis mengenai dinamika sejarah di balik tanggal yang mereka rayakan. Pelajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah dasar dan menengah sering kali hanya menyalin naskah resmi pemerintah daerah tanpa membuka ruang diskusi bagi interpretasi alternatif. Historiografi kultural melihat fenomena ini sebagai keberhasilan hegemoni *gramscian*, di mana kelas penguasa berhasil mengarahkan cara berpikir masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat menerima tatanan nilai, simbol, dan narasi sejarah yang disodorkan penguasa sebagai sesuatu yang alamiah, benar, dan membawa kebahagiaan Bersama (Gramsci, 1971).

SIMPULAN

Perayaan Milangkala di Tatar Sunda bukan sekadar perayaan pergantian kalender tahunan sebuah daerah, melainkan sebuah situs kebudayaan yang kompleks di mana sejarah, kekuasaan, dan masyarakat saling berkelindan dan berkontestasi. Melalui perspektif historiografi kultural, penelitian ini berhasil menyingkap tiga dimensi krusial dari fenomena *milangkala*:

1. **Secara historis**, penetapan hari jadi daerah di Tatar Sunda merupakan hasil dari konstruksi politik-akademis yang bersifat selektif. Pemerintah daerah cenderung memilih narasi yang mampu memberikan romantisasi masa lalu yang agung (*golden age*) atau legalitas formal yang menguntungkan identitas daerah, seraya melakukan amnesia selektif terhadap unsur-unsur kolonial atau konflik sosial yang traumatik.
2. **Secara simbolis**, ritus-ritus *milangkala* berfungsi sebagai sarana sublimasi feodalisme kultural ke dalam struktur birokrasi modern. Penggunaan pakaian adat, kirab pataka, dan tata laksana upacara dirancang secara semiotis untuk memproduksi mitos-mitos yang menaturalisasi dan mensakralkan otoritas elit politik lokal di mata rakyat.

3. **Secara edukatif**, perayaan *milangkala* sejauh ini masih mengalami defisit narasi kritis. Fungsi edukasi publiknya terpinggirkan oleh arus komodifikasi pariwisata yang profan dan propaganda politik pembangunan yang glorifikatif. Masyarakat cenderung ditempatkan sebagai objek tontonan dan konsumen, bukan sebagai subjek sejarah yang kritis dan emansipatif.

Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya dekonstruksi dan reposisi terhadap cara kita merayakan hari jadi daerah. Perayaan *milangkala* di masa depan harus berani membuka ruang bagi "sejarah dari bawah" (*history from below*), melibatkan partisipasi publik yang lebih demokratis, dan mengubah festival seremonial menjadi ruang refleksi budaya yang kritis, demi mewujudkan masyarakat Tatar Sunda yang tidak hanya bangga akan masa lalunya, tetapi juga cerdas dan berdaya dalam menghadapi masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. O. (2006). *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Cornell University Press.
- Ankersmit, F. R. (2002). *Historical Representation*. Stanford: Stanford University Press.
- Barthes, R. (1972). *Mythologies*. Hill and Wang.
- Burke, P. (2005). *History and Social Theory*. Polity Press.
- Ekadjati, E. S. (2005). *Kebudayaan Sunda; suatu Pendekatan Sejarah* (Vol. 1). Pustaka Jaya.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Pantheon Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith (Eds.)). International Publishers.
- Halbwachs, M. (1992). *On Collective Memory*. The University of Chicago Press.
- Hobsbawm, E. J., & Ranger, T. (1992). *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Lubis, N. H. (2003). *Sejarah tatar Sunda*. Satya Historika.

- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (Eds.). (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Picard, M. (2006). *Bali: pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suryanegara, A. M. (1995). *Menemukan sejarah: Wacana pergerakan Islam di Indonesia*. Mizan.
- Weber, M. (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology* (Vol. 1). Bedminster Press.